
REVITALISASI TRADISI TUDANG SIPULUNG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS MUSYAWARAH RKP DESA

Muhammad Aris

Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, Indonesia

Email Korespondensi: arismuhammad20041986@gmail.com

Diterima Redaksi: 13-01-2025 | Selesai Revisi: 07-04-2025 | Diterbitkan Online: 08-04-2025

Abstrak

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam menyusun prioritas usulan pembangunan di Kabupaten Wajo serta strategi yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas musyawarah RKP Desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah RKP Desa sudah cukup efektif dalam menyusun prioritas usulan pembangunan di Kabupaten Wajo, meskipun masih terdapat kendala terkait partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas musyawarah RKP Desa adalah melakukan pertemuan di tingkat bawah dengan kelompok masyarakat melalui kearifan lokal *tudang sipulung*.

Kata Kunci: Efektivitas; Perencanaan Pembangunan Desa; Partisipasi Masyarakat.

Abstract

*In preparing development planning at the village level, the village government is obliged to hold development planning deliberations. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) deliberation in prioritizing development proposals in Wajo Regency and the strategies undertaken in increasing the effectiveness of the RKP Desa deliberation. This research is a qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, and literature study. The data analysis technique was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of the study revealed that the RKP Desa deliberation was quite effective in prioritizing development proposals in Wajo Regency, although there were still obstacles related to community participation that still needed to be improved. An effective strategy to increase the effectiveness of the RKP Desa deliberations is to hold meetings at the grassroots level with community groups through the local wisdom of *tudang sipulung*.*

Keywords: Effectiveness; village development planning; community participation.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi instrumen kunci. RPJM Desa merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun setiap enam tahun sekali, sementara RKP Desa adalah dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa ke dalam rencana kerja konkret yang dapat dieksekusi setiap tahunnya (Roza & Arliman, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *bottom-up planning*, yang bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan desa (Rahmawati, 2015). Masyarakat desa diharapkan berperan aktif dalam setiap tahapan proses, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengusulan program, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Namun, kenyataannya, pelaksanaan proses perencanaan ini menghadapi sejumlah kendala.

Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang hadir dalam musyawarah hanya untuk memenuhi undangan, tanpa memberikan kontribusi berupa usulan atau masukan. Hal ini terjadi karena masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya peran mereka dalam proses ini. Selain itu, usulan yang diajukan masyarakat tidak selalu didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif. Sebagian besar usulan lebih mencerminkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga sulit menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar mendesak. Forum musyawarah juga sering kali kurang efektif dalam menciptakan diskusi yang konstruktif. Ketimpangan partisipasi antar kelompok masyarakat juga menjadi masalah, di mana kelompok marginal, seperti perempuan dan kaum muda, sering kali kurang terwakili. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pelibatan

masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan realitas di lapangan (Melis et al., 2016).

Dalam konteks Kabupaten Wajo, pelaksanaan musyawarah RKP Desa telah dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Musyawarah ini menjadi forum penting yang memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Musyawarah ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan. Dalam proses ini, dokumen RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman utama yang memastikan bahwa usulan yang diajukan sesuai dengan visi, misi, dan rencana jangka panjang desa. Selain itu, hasil musyawarah menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting (Nur Fitrah, 2019).

Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, efektivitas musyawarah RKP Desa dalam menyusun prioritas pembangunan di Kabupaten Wajo masih perlu ditingkatkan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan partisipasi masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya musyawarah desa, serta kurangnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan. Sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya peran mereka dalam proses ini, sehingga kurang aktif dalam menyampaikan usulan atau berkontribusi dalam diskusi. Bahkan, beberapa masyarakat hanya hadir untuk memenuhi undangan tanpa memberikan masukan yang berarti. Dalam hal ini, rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan musyawarah yang efektif (Melis et al., 2016).

Efektivitas pelaksanaan musyawarah RKP Desa sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sinergi ini akan mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sayangnya, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian ini, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Wajo

masih rendah. Banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi karena kurang memahami pentingnya peran mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor yang turut memengaruhi keterlibatan mereka dalam musyawarah. Selain itu, forum musyawarah sering kali kurang efektif dalam menciptakan diskusi yang konstruktif, karena minimnya fasilitasi yang baik dari pemerintah desa serta terbatasnya data dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam diskusi.

Di sisi lain, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan musyawarah RKP Desa adalah menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak kasus, usulan yang diajukan masyarakat lebih mencerminkan kepentingan individu atau kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menyulitkan pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga maupun informasi, menjadi kendala tambahan yang harus diatasi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan berbagai strategi yang dapat meningkatkan efektivitas musyawarah RKP Desa di Kabupaten Wajo. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui kearifan lokal Tudang Sipulung. Tudang Sipulung adalah tradisi musyawarah atau diskusi bersama dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Secara harfiah, tudang berarti "duduk" dan sipulung berarti "berkumpul", sehingga istilah ini menggambarkan praktik duduk bersama untuk bermusyawarah dan mencari solusi atas suatu permasalahan. Tradisi ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam membahas masalah adat, menyelesaikan sengketa, merencanakan pembangunan desa, serta sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Tudang Sipulung biasanya diadakan di tempat terbuka atau rumah adat dan dipimpin oleh tokoh masyarakat, pemuka adat, atau pemimpin formal seperti kepala desa. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan memberikan solusi terhadap masalah yang dibahas. Keputusan dalam forum ini umumnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

yang mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam budaya Bugis-Makassar. Meskipun merupakan tradisi lama, Tudang Sipulung masih terus dipraktikkan hingga kini. Bahkan, konsepnya telah berkembang ke dalam forum-forum modern, seperti dalam pemerintahan, pendidikan, dan organisasi sosial, sebagai sarana komunikasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak.

Tradisi ini memungkinkan masyarakat berdiskusi secara informal di tingkat RT atau RW sebelum musyawarah RKP Desa dilaksanakan. Melalui tudang sipulung, kelompok-kelompok masyarakat yang jarang terlibat, seperti kelompok perempuan dan kelompok pemuda, dapat lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya musyawarah RKP Desa. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, brosur, dan media sosial. Dalam sosialisasi ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang skala prioritas pembangunan serta dampak positif yang dapat mereka rasakan jika usulan mereka diakomodasi dalam RKP Desa.

Penguatan kapasitas aparatur desa juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas musyawarah. Aparatur desa, termasuk perangkat desa dan pendamping desa, perlu diberikan pelatihan memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memfasilitasi musyawarah. Dengan fasilitasi yang baik, forum musyawarah dapat menjadi lebih efektif dalam menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, representasi kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas lainnya, perlu ditingkatkan dalam musyawarah RKP Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kuota keterwakilan dalam forum musyawarah, serta memberikan dukungan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Efektivitas musyawarah RKP Desa di Kabupaten Wajo memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Toar et al. (2019), keberhasilan pembangunan desa akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa harus menjadi prioritas

utama. Dengan memperkuat efektivitas musyawarah RKP Desa, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan akan menciptakan rasa memiliki yang lebih besar, sehingga meningkatkan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai efektivitas musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam menyusun prioritas usulan pembangunan di Kabupaten Wajo, serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan langsung, wawancara, serta analisis dokumen, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian dilaksanakan selama periode April hingga Oktober 2020 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Wajo memiliki dinamika pembangunan desa yang relevan dengan isu partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Peneliti memilih beberapa desa sebagai sampel dari zona yang telah ditentukan, dengan kriteria tertentu untuk mencerminkan keberagaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana musyawarah RKP Desa efektif dalam menentukan prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi kendala dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Observasi digunakan untuk memperoleh data empiris tentang proses pelaksanaan musyawarah RKP Desa, interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah. Peneliti mencatat secara detail setiap aktivitas yang terjadi

selama musyawarah, termasuk dinamika diskusi, jumlah peserta yang hadir, dan kontribusi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses penyusunan RKP Desa. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta pendamping desa. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa warga masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam musyawarah RKP Desa untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Pertanyaan wawancara disusun secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan yang relevan selama proses wawancara berlangsung.

Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Peneliti menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti dokumen RKP Desa, RPJM Desa, dan berita acara musyawarah desa, untuk memahami lebih lanjut prosedur dan hasil perencanaan pembangunan desa. Selain itu, literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkaya analisis.

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal sebagai Model Interaktif Miles dan Huberman. Analisis ini termasuk dalam pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan (Miles et al., 2014). Proses analisis dalam model ini terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang telah dikumpulkan agar lebih fokus pada permasalahan penelitian. Data yang tidak relevan akan dieliminasi sehingga hanya informasi yang bermakna yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis, tabel, atau grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan empiris dari lapangan

dipadukan dengan teori yang digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh dapat menggambarkan realitas secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Kabupaten Wajo telah berjalan dengan cukup baik dalam menyusun prioritas pembangunan desa. Namun, masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan efektivitas musyawarah dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar mendesak.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Pada tahap reduksi data, berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi disaring untuk mengidentifikasi aspek-aspek utama yang menjadi fokus penelitian. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa efektivitas musyawarah RKP Desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, transparansi dalam proses musyawarah, serta kualitas fasilitasi dari pemerintah desa.

Pada tahap penyajian data, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap musyawarah RKP Desa sebagai forum formalitas belaka. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Keera, "Masyarakat diundang untuk hadir dalam musyawarah, tetapi sebagian besar hanya mendengarkan tanpa aktif memberikan usulan. Bahkan, ada yang datang hanya untuk memenuhi undangan tanpa memahami tujuan utama musyawarah tersebut." (Hasil wawancara, 7 Juli 2020).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Melis et al. (2016), yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sering kali disebabkan oleh

kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan.

Dalam tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, ditemukan bahwa efektivitas musyawarah RKP Desa masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih inklusif. Strategi yang dapat diterapkan meliputi sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi musyawarah, serta pemanfaatan kearifan lokal seperti Tudang Sipulung sebagai forum diskusi informal sebelum musyawarah desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah

Salah satu indikator keberhasilan musyawarah RKP Desa adalah tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Wajo masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat hadir dalam musyawarah hanya untuk mendengarkan tanpa memberikan masukan atau mengusulkan program yang benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif desa.

Seorang Sekretaris Desa di Kecamatan Tanasitolo mengungkapkan, "Ketika musyawarah RKP Desa berlangsung, masyarakat yang hadir sering kali hanya mendengarkan. Hanya segelintir orang, terutama tokoh masyarakat, yang aktif menyampaikan pendapat mereka." (Hasil wawancara, 20 Agustus 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih jauh dari ideal. Liando et al. (2017) menekankan bahwa perencanaan pembangunan desa yang efektif harus berbasis pada prinsip *bottom-up planning*, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan.

Selain itu, representasi kelompok marginal, seperti perempuan dan pemuda, dalam musyawarah juga masih minim. Salah satu tokoh pemuda yang diwawancarai menyatakan, "Kami jarang dilibatkan dalam musyawarah. Biasanya yang hadir adalah tokoh masyarakat yang lebih senior, sementara kami hanya mendengarkan tanpa memiliki kesempatan untuk berkontribusi." (Hasil wawancara, 22 Agustus 2020).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pendekatan berbasis kearifan lokal seperti Tudang Sipulung dapat dioptimalkan. Tudang Sipulung memungkinkan

masyarakat berdiskusi secara informal sebelum musyawarah RKP Desa, sehingga kelompok-kelompok yang kurang aktif dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam suasana yang lebih terbuka dan tidak formal.

Kendala dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan

Selain rendahnya partisipasi masyarakat, kendala lain dalam musyawarah RKP Desa adalah sulitnya menentukan skala prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa banyak usulan yang diajukan lebih mencerminkan kepentingan individu atau kelompok tertentu dibandingkan dengan kebutuhan desa secara keseluruhan.

Seorang kepala desa mengungkapkan, "Sering kali masyarakat mengusulkan pembangunan jalan di sekitar rumah mereka atau proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kebutuhan desa secara luas." (Hasil wawancara, 16 Juli 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan visi pembangunan yang lebih strategis. Sesuai dengan pendapat Rahmawati (2015), perencanaan pembangunan desa harus berorientasi pada kebutuhan kolektif masyarakat, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, keterbatasan data dan informasi juga menjadi hambatan dalam menyusun prioritas pembangunan. Beberapa desa masih menggunakan data lama yang tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Salah satu pendamping desa menyatakan, "Pemerintah desa sering kali menyusun RKP Desa berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya tanpa memperbarui informasi terbaru. Akibatnya, banyak program yang tidak sesuai dengan kondisi desa saat ini." (Hasil wawancara, 22 Agustus, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan data yang lebih baik agar keputusan yang diambil dalam musyawarah RKP Desa benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan riil masyarakat.

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah RKP Desa

Musyawarah RKP Desa di Kabupaten Wajo telah menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, seperti memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan

sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, musyawarah ini merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa pembangunan desa berbasis pada kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rahmawati (2015), yang menyatakan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, efektivitas ini belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal partisipasi masyarakat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, banyak masyarakat yang hadir dalam musyawarah hanya untuk memenuhi undangan, tanpa memberikan kontribusi aktif. Selain itu, representasi kelompok marginal, seperti perempuan dan pemuda, juga masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan musyawarah, sehingga semua elemen masyarakat dapat terlibat secara maksimal.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan efektivitas musyawarah RKP-Desa di Kabupaten Wajo, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Pemerintah desa perlu lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya musyawarah RKP-Desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan warga, media sosial, serta brosur informatif tentang peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Memanfaatkan kearifan lokal Tudang Sipulung

Tudang Sipulung dapat menjadi forum awal bagi masyarakat untuk berdiskusi sebelum musyawarah RKP-Desa berlangsung. Dengan adanya diskusi informal ini, usulan yang diajukan dalam musyawarah desa dapat lebih matang dan mencerminkan kebutuhan kolektif.

3. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi musyawarah

Perangkat desa perlu diberikan pelatihan tentang cara memfasilitasi diskusi yang lebih partisipatif, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan terdorong untuk menyampaikan pendapat mereka.

4. Memastikan representasi kelompok marginal

Pemerintah desa dapat menetapkan kuota keterwakilan bagi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya agar musyawarah lebih inklusif dan representatif.

5. Mengoptimalkan pengelolaan data pembangunan desa.

Pemerintah desa perlu memperbarui dan mengelola data pembangunan secara lebih sistematis agar keputusan yang diambil dalam musyawarah RKP-Desa didasarkan pada informasi yang valid dan akurat.

Pentingnya Data yang Akurat

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan musyawarah RKP Desa adalah kurangnya data dan informasi yang akurat. Data yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa sering kali tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan, sehingga menyulitkan tim penyusun dalam menentukan prioritas program. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola data dan informasi. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis data, dapat membantu pemerintah desa dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih efektif.

Implikasi Pembangunan Desa

Efektivitas musyawarah RKP Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Toar et al. (2019), keberhasilan pembangunan desa akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa harus menjadi prioritas utama. Dengan memperkuat efektivitas musyawarah RKP Desa, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa musyawarah desa yang efektif mampu menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga proses pembangunan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas musyawarah RKP Desa perlu terus dilakukan sebagai bagian

dari komitmen pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) di Kabupaten Wajo masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat, penentuan skala prioritas pembangunan, dan fasilitasi musyawarah oleh pemerintah desa. Meskipun forum musyawarah telah menjadi instrumen utama dalam menyusun program pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah, banyak peserta yang pasif, serta dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kendala dalam pengelolaan data pembangunan menyebabkan keputusan yang diambil tidak selalu berbasis pada kebutuhan aktual masyarakat.

Temuan utama dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tradisi Tudang Sipulung sebagai strategi dalam meningkatkan efektivitas musyawarah RKP-Desa. Tudang Sipulung, sebagai forum diskusi informal di tingkat komunitas, terbukti dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka sebelum musyawarah formal dilakukan. Dengan pendekatan ini, representasi kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda dapat lebih ditingkatkan, sehingga perencanaan pembangunan lebih inklusif dan partisipatif.

Dampak dari penelitian ini tidak hanya bersifat akademik tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan. Dengan mengoptimalkan mekanisme partisipasi masyarakat dan memperbaiki sistem pengelolaan data pembangunan desa, diharapkan musyawarah RKP-Desa dapat berfungsi lebih efektif dalam menentukan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi musyawarah serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan pembangunan dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola desa yang lebih baik.

Ke depan, penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai efektivitas model Tudang Sipulung di berbagai daerah lain, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat keberlanjutan program pembangunan desa. Oleh karena itu, penerapan strategi berbasis kearifan lokal harus terus dikembangkan sebagai pendekatan inovatif dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa di Indonesia.

Adapun saran berdasarkan Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai pentingnya musyawarah RKP Desa kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, brosur, dan media sosial, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang manfaat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Edukasi ini juga harus mencakup penjelasan mengenai skala prioritas pembangunan dan bagaimana usulan masyarakat dapat berkontribusi terhadap pembangunan desa secara keseluruhan.
2. Mene Tradisi lokal seperti tudang sipulung dapat diintegrasikan ke dalam proses musyawarah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Diskusi informal di tingkat RT atau RW sebelum musyawarah RKP Desa dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang jarang terlibat, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas lainnya. Pendekatan ini juga dapat menciptakan suasana yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat.
3. Untuk memastikan inklusivitas dalam musyawarah, pemerintah desa dapat menetapkan kuota keterwakilan bagi kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Kuota ini dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa aspirasi semua kelompok masyarakat terakomodasi dalam dokumen RKP Desa. Selain itu, pendampingan khusus dapat diberikan kepada kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyampaikan usulan.
4. Pemerintah desa perlu memberikan pelatihan kepada aparatur desa dan pendamping desa terkait fasilitasi musyawarah, pengelolaan data, dan analisis

kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas ini, aparat desa dapat memimpin musyawarah secara lebih profesional, sehingga menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

5. Pemerintah desa perlu memperkuat sistem pengelolaan data untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis data, dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dan menganalisis data sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa secara lebih efektif. Data yang akurat juga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk menciptakan sinergi yang lebih baik, pemerintah desa perlu melibatkan semua pihak dalam proses pembangunan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan melibatkan semua pihak, pelaksanaan musyawarah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.
7. Pemanfaatan media digital, seperti grup WhatsApp atau platform komunikasi lainnya, dapat menjadi cara untuk menginformasikan masyarakat tentang agenda musyawarah dan memperluas jangkauan sosialisasi. Media ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan masyarakat sebelum musyawarah berlangsung, sehingga memudahkan proses diskusi dan pengambilan keputusan.
8. Pemerintah desa perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan musyawarah RKP Desa. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan musyawarah ke depan. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan realitas di lapangan.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arnstein, S. R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Cornwall, A. (2008). "Unpacking 'Participation': Models, Meanings, and Practices." *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58.
- Dollah, B. (2016). "Tudang Sipulung sebagai Komunikasi Kelompok dalam Berbagi Informasi." *Jurnal Pekommas*, 1(2), 177-188.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati, P. (2018). "Tudang Sipulung sebagai Media Integrasi Masyarakat Amparita di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan." *Walasuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9(1), 211-224.
- Ginting, R. (2020). "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45-60.
- Isnayanti, K., Maherni, L. B. S., & Irayani, M. P. (2019). Dampak Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Jagaraga). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 109–121.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Emba*, 5(6), 1474–1483.
- Melis, Muthalib, A. A., & Apoda. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 99–105.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nur Fitrah, A. M. (2019). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. *MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 4(1), 28–43.
- Prasetyo, K. T., Surya, I., & Hasanah, N. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Muarawis Kecamatan Muara Wis kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 2041–2054.
- Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*, 305–313.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Ruminding, V., Tampake, T., & Harisantoso, I. T. (2021). "Tradisi Tudang Sipulung sebagai Basis Perdamaian dalam Perspektif Gereja Toraja Jemaat Seriti." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(1), 57-64
- Toar, K., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2019). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing.
- Yunda, A. A., Mirsa, S., & Wardah, W. (2018). "Revitalisasi Tudang Sipulung sebagai Media Komunikasi Vertikal antara Masyarakat dan Pemerintah di Kabupaten Bone." *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 264-278.
- Yunus. (2020). "Model Tudang Sipulung dalam Pembelajaran Islam dan Kearifan Lokal." *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 2(3), 293-308.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa